

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.

Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*.

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Sape dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Sape adalah perbaikan jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah- rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Kariango Kepala Desa Sape dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan.

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi kesalah fahaman pengertian tentang masalah yang diteliti maka perludidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas :

1. Pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pembangunan infrastruktur jalan dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Dengan membangun atau memperbaiki prasarana transportasi akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat.
4. Meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa capaian kinerja pembangunan di Desa Sape masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang ada masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah masalah yang relevan dengan penelitian ini yakni :

- a. Kinerja pemerintahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum optimal.
- b. Kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berasal dari Alokasi dana Desa.

- c. Kurangnya sosialisasi pemerintahan desa pada masyarakat dan tranparansi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang masih bersifat dirahasiakan.
- d. Terlambatnya pengajuan dan pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Pengelola atau penguasa (kepala desa) anggaran tidak sepenuhnya dapat mengelola anggaran yang diajukan setiap tahunnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

1.5. Manfaat Penelitian

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat . Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah Desa, dalam rangka usaha memaksimalkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.